

Ballot Heist:

**Laporan tentang Kesenjangan Transparansi
Pendanaan Kampanye dalam Pemilihan
Gubernur Indonesia 2024**

Transparency International Indonesia

Latar Belakang

Perhelatan **Pilkada 2024** menandai capaian baru bagi peradaban demokrasi Indonesia. Diselenggarakan serentak untuk pertama kalinya di **37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota** pada November 2024, pemilihan serentak itu kini telah benar-benar telah mendekati babak akhirnya.

Dinamika **pendanaan kampanye** pada Pilkada 2024 juga tidak cukup dilihat sebagai faktor penentu kemenangan kandidat, melainkan juga harus dilihat sebagai tolok ukur kualitas demokrasi elektoral. Sejumlah pertanyaan penting terkait pendanaan kampanye harus diajukan. Misalnya, **dari mana para kandidat mendapatkan dana?** Apakah keseluruhan dana kampanye **dilaporkan**? Atau, apakah pendanaan kampanye telah menyebabkan/memperburuk **ketimpangan kontestasi** secara signifikan?

Oleh karena itu, Transparency International Indonesia (TII) telah **memantau laporan dana kampanye** pada Pilkada 2024, khususnya dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Melalui pemantauan ini, diharapkan dapat diperoleh penggambaran yang mewakili dinamika pendanaan kampanye pada Pilkada 2024 secara menyeluruh, identifikasi permasalahan, serta rekomendasi perbaikan yang tepat sasaran.

Tujuan

1. Menguji **transparansi dan akuntabilitas** pendanaan kampanye pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2024.
1. Menguraikan **ketimpangan dalam pendanaan kampanye**, khususnya dari perspektif gender, pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Pilkada 2024.
1. Menghasilkan rekomendasi untuk **penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas** pendanaan kampanye serta tatanan politik yang lebih setara.

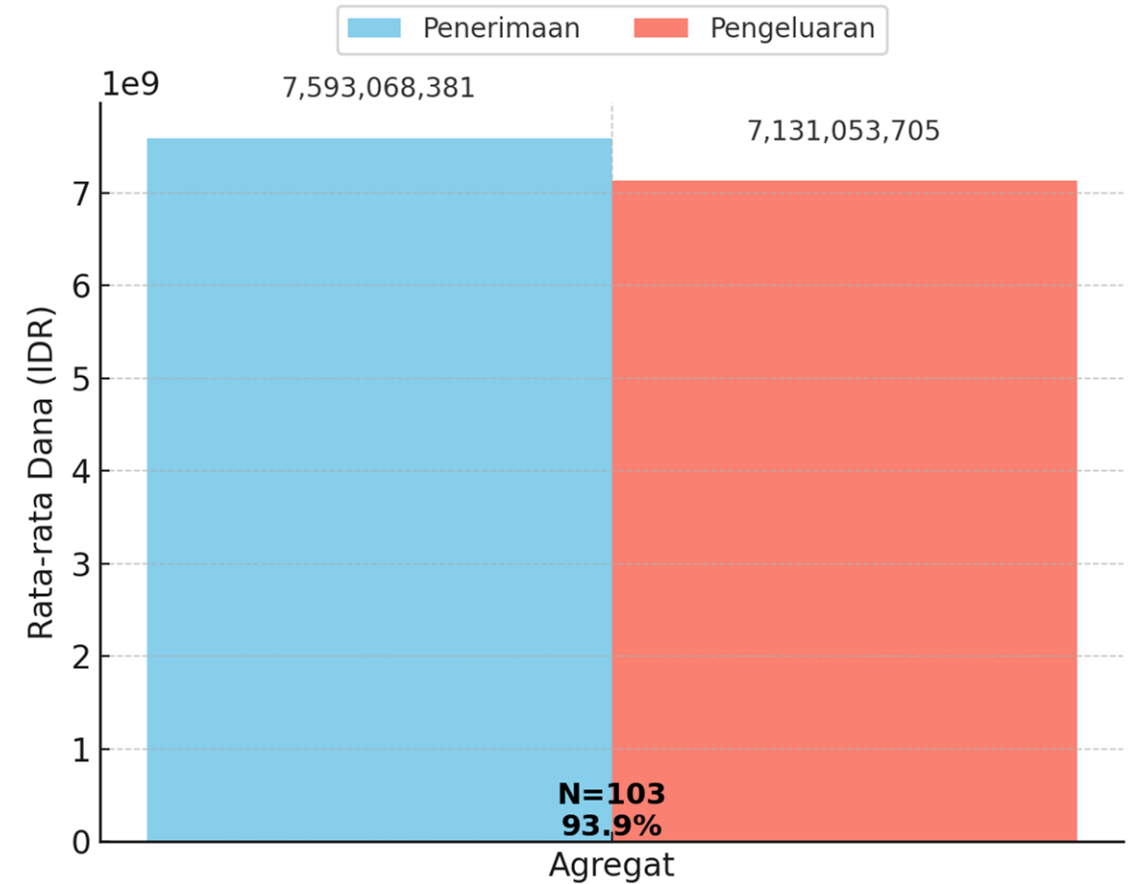
Batasan Pemantauan

- Cakupan: 37 Provinsi
- 103 pasangan calon:
 - 1 pasangan calon independen, 102 pasangan calon usulan partai politik
 - 20 pasangan calon melibatkan perempuan, 83 pasangan calon hanya laki-laki
 - 8 pasangan calon melibatkan perempuan terpilih, 29 pasangan calon hanya laki-laki terpilih.
- Basis data:
 - Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
 - Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
 - Keputusan KPU Provinsi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- Metode pengambilan data:
 - Pengunduhan secara manual dari portal KPU (Infopemilu/SIKADEKA dan website KPU Provinsi)
 - Permohonan informasi melalui PPID KPU

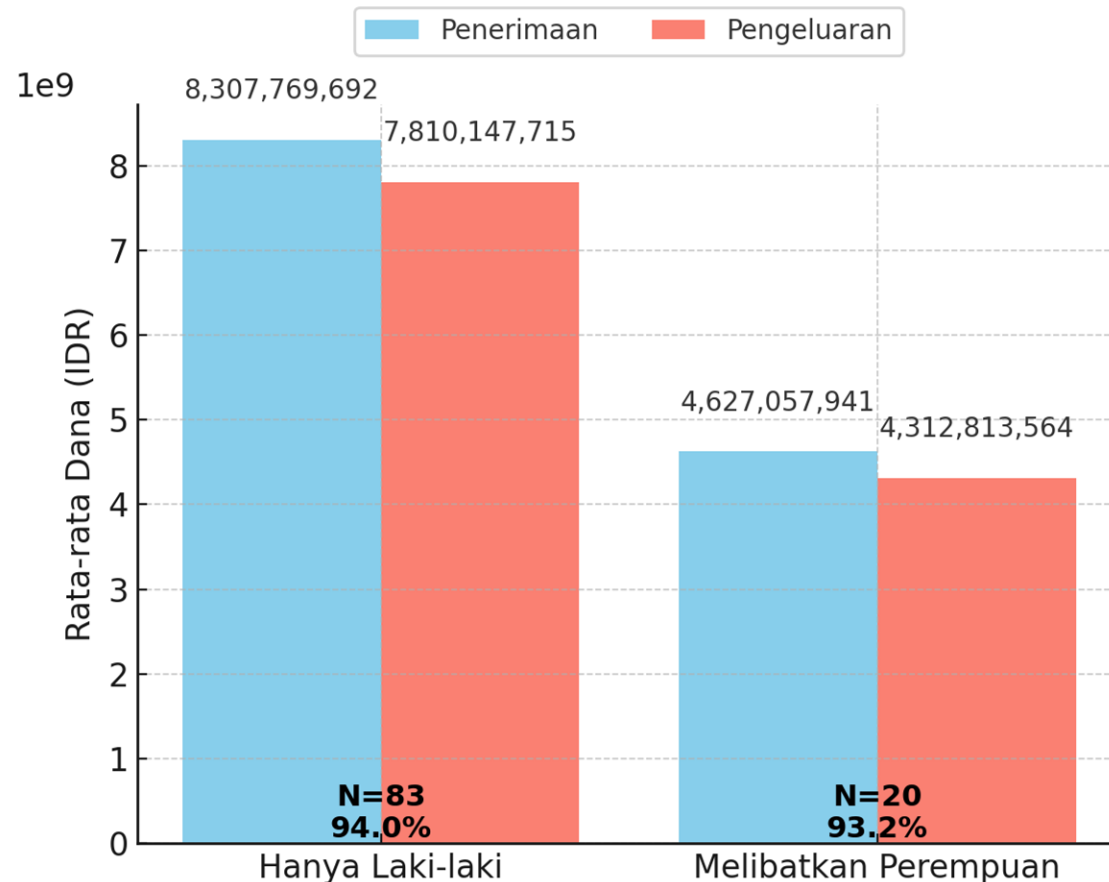
Penerimaan & Pengeluaran

Rerata penerimaan dan pengeluaran pasangan calon gubernur & wakil gubernur (agregat)

- Secara agregat, rasio pengeluaran terhadap penerimaan adalah sebesar 93,91%.

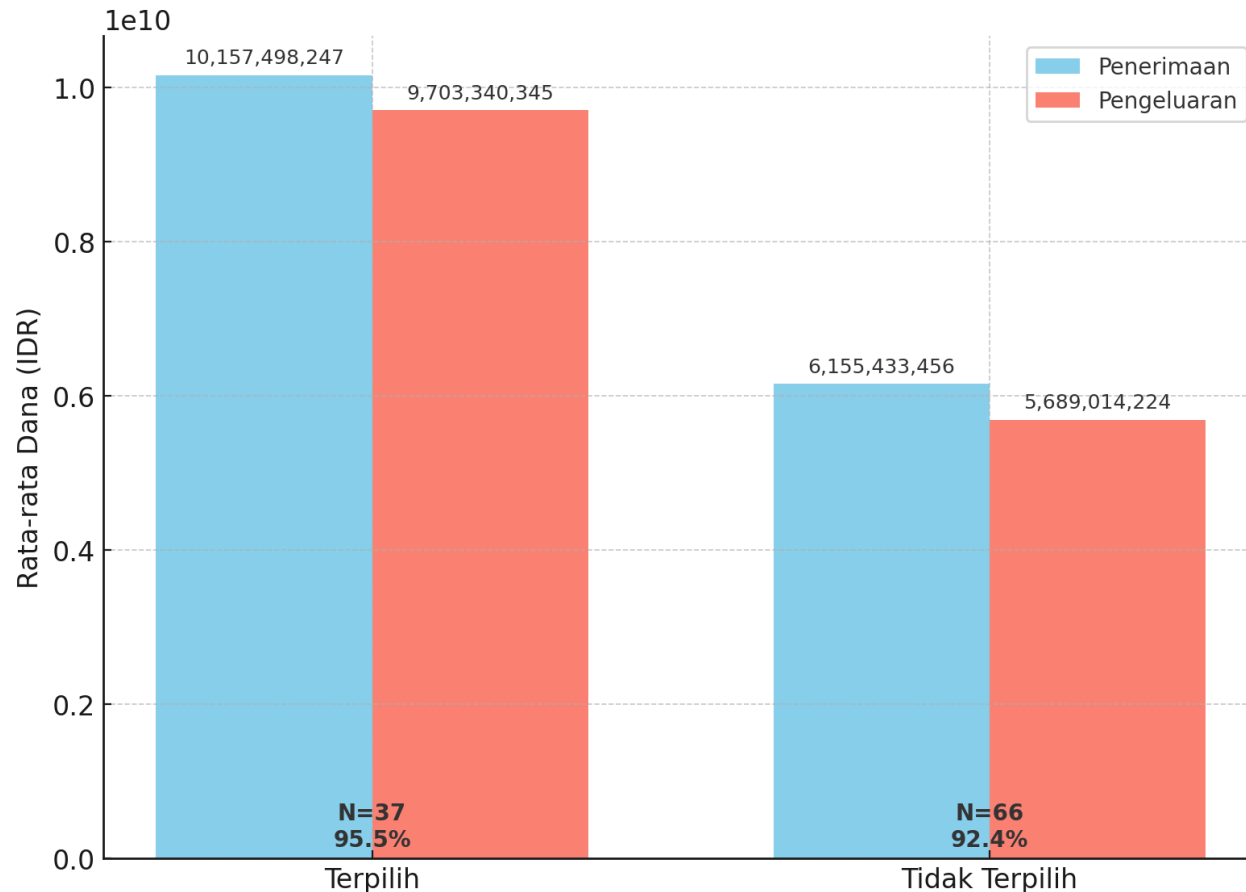


Rerata penerimaan dan pengeluaran pasangan calon gubernur & wakil gubernur (pemilahan gender)



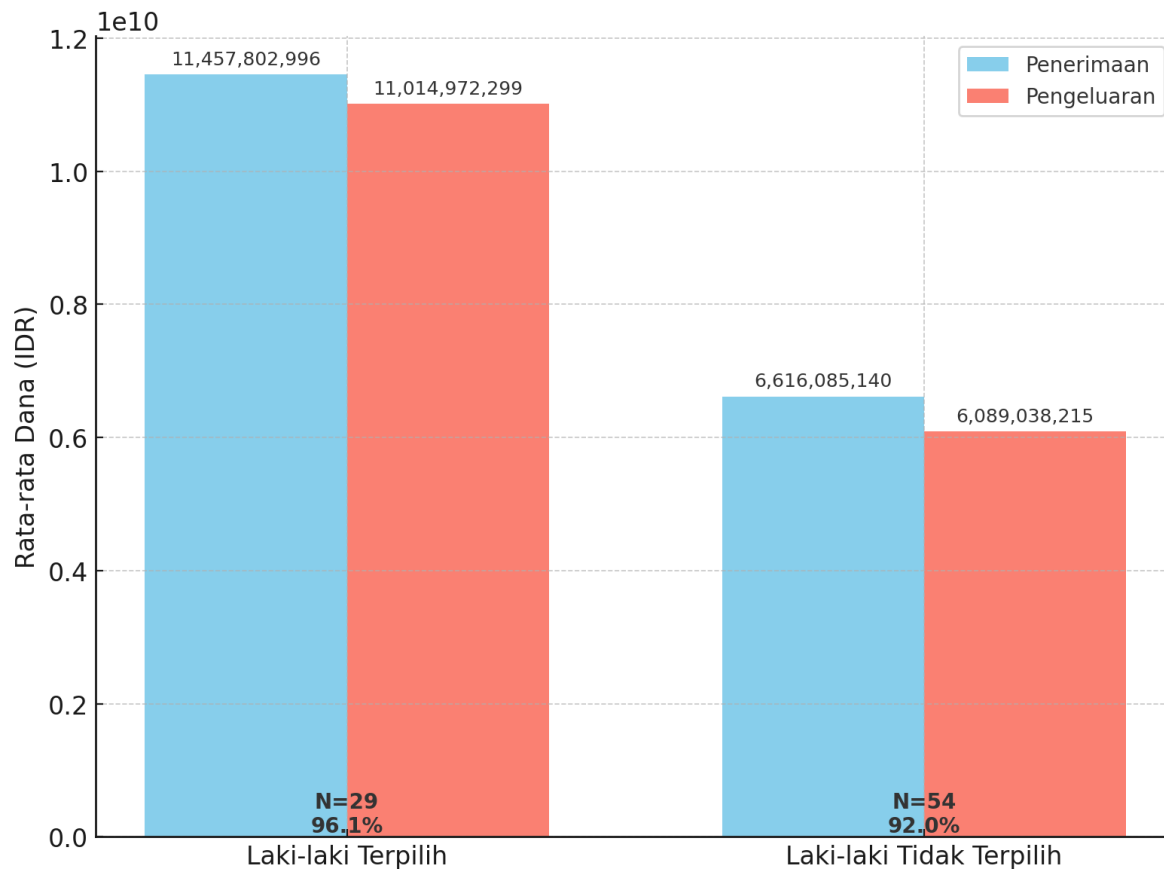
- Pasangan calon hanya laki-laki memiliki penerimaan **79,5% lebih besar** dan pengeluaran **81% lebih besar** dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan.
- Pasangan calon hanya laki-laki memiliki **tingkat pengeluaran yang lebih tinggi** dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan, dengan rasio pengeluaran terhadap penerimaan sebesar 94,01% dibandingkan 93,21%.
- Mengindikasikan bahwa pasangan calon hanya laki-laki memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber pendanaan, dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan.

Rerata penerimaan dan pengeluaran pasangan calon gubernur & wakil gubernur (pemilahan status keterpilihan)



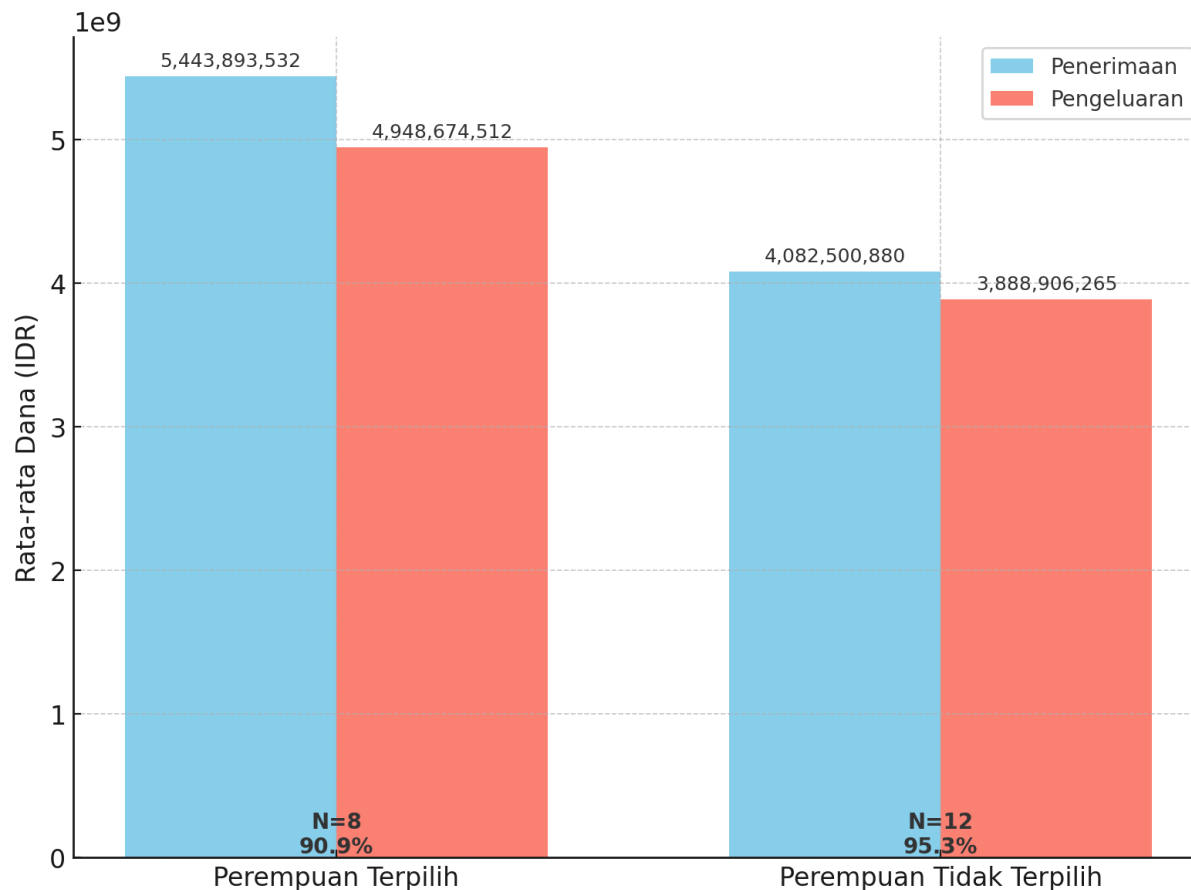
- Pasangan calon terpilih mencatatkan penerimaan **65,02% lebih besar** dan pengeluaran **70,56% lebih besar** dibandingkan pasangan calon tidak terpilih.
- Pasangan calon terpilih memiliki tingkat pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pasangan calon tidak terpilih, dengan rasio pengeluaran terhadap penerimaan sebesar **95,5% dibandingkan 92,4%**.
- Mengindikasikan bahwa dana kampanye yang lebih besar berkontribusi terhadap keterpilihan.

Rerata penerimaan dan pengeluaran pasangan calon gubernur & wakil gubernur yang hanya terdiri dari laki-laki (pemilahan status keterpilihan)



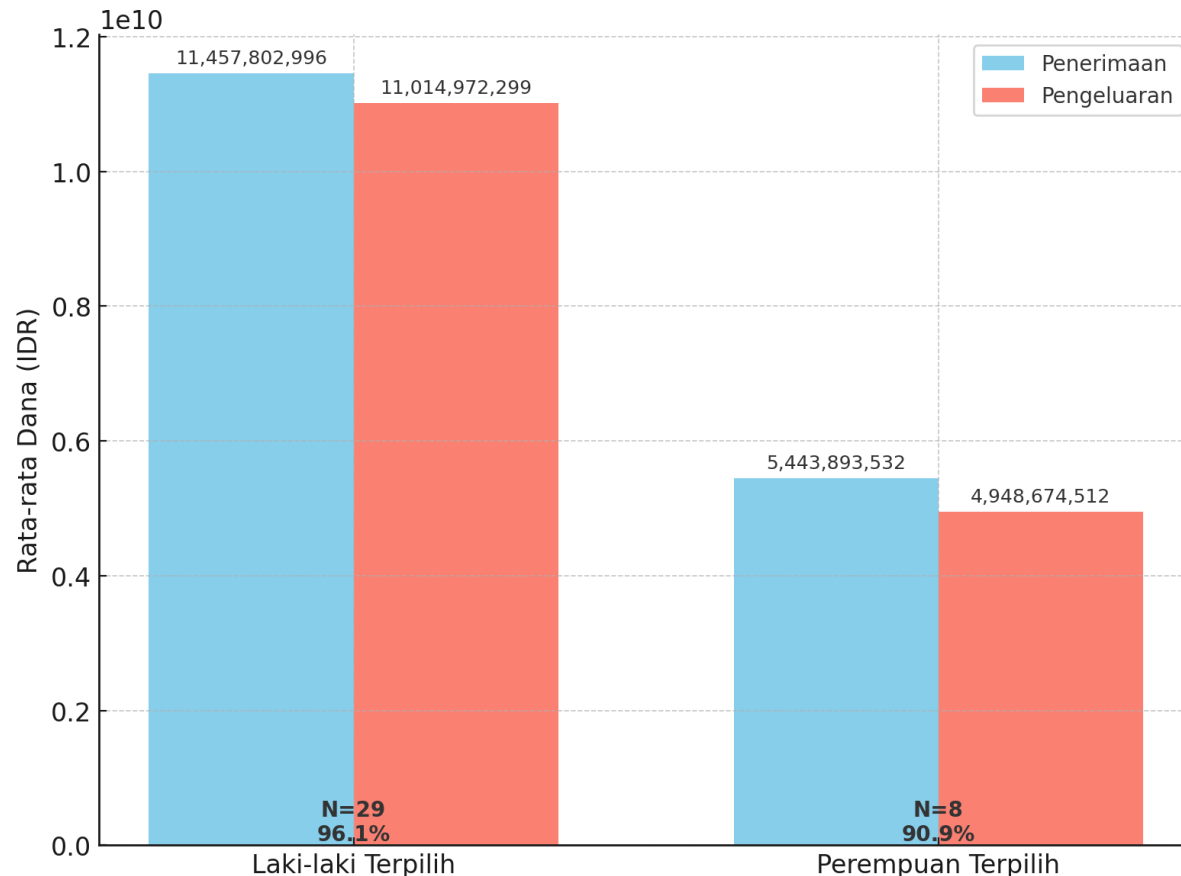
- Pasangan calon hanya laki-laki terpilih mencatatkan penerimaan **73,2%** dan pengeluaran **80,9%** lebih besar dibandingkan pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih.
- Pasangan calon hanya laki-laki terpilih memiliki tingkat pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih, dengan rasio pengeluaran terhadap penerimaan sebesar **96,1%** dibandingkan **92%**.
- Mengindikasikan bahwa dana kampanye yang lebih besar berkontribusi terhadap keterpilihan.

Rerata penerimaan dan pengeluaran pasangan calon gubernur & wakil gubernur yang melibatkan perempuan (pemilahan status keterpilihan)



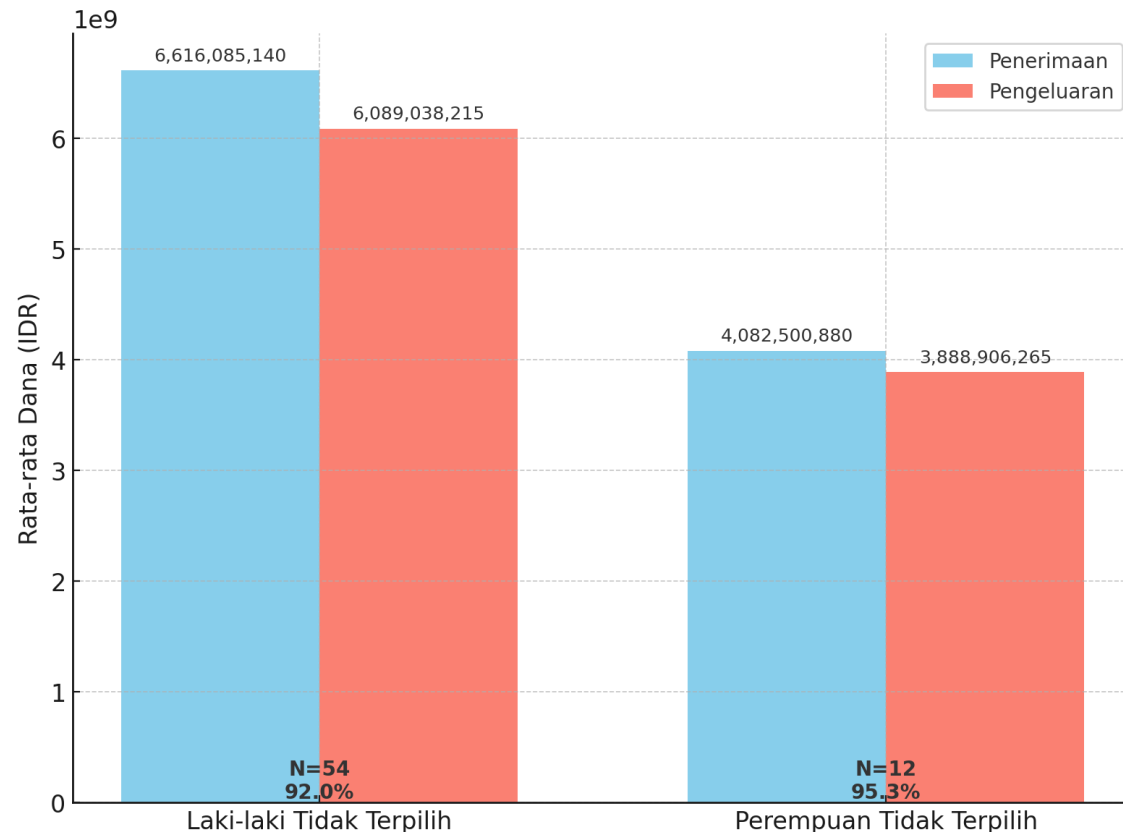
- Pasangan calon melibatkan perempuan terpilih mencatatkan penerimaan **33,3%** dan pengeluaran **27,2%** lebih besar dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan tidak terpilih.
- Pasangan calon melibatkan perempuan terpilih memiliki tingkat pengeluaran yang lebih kecil dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan tidak terpilih, dengan rasio pengeluaran terhadap penerimaan sebesar **90,9%** dibandingkan **95,3%**.
- Mengindikasikan bahwa dana kampanye yang lebih besar berkontribusi terhadap keterpilihan.

Rerata penerimaan dan pengeluaran pasangan calon gubernur & wakil gubernur terpilih (pemilahan gender)



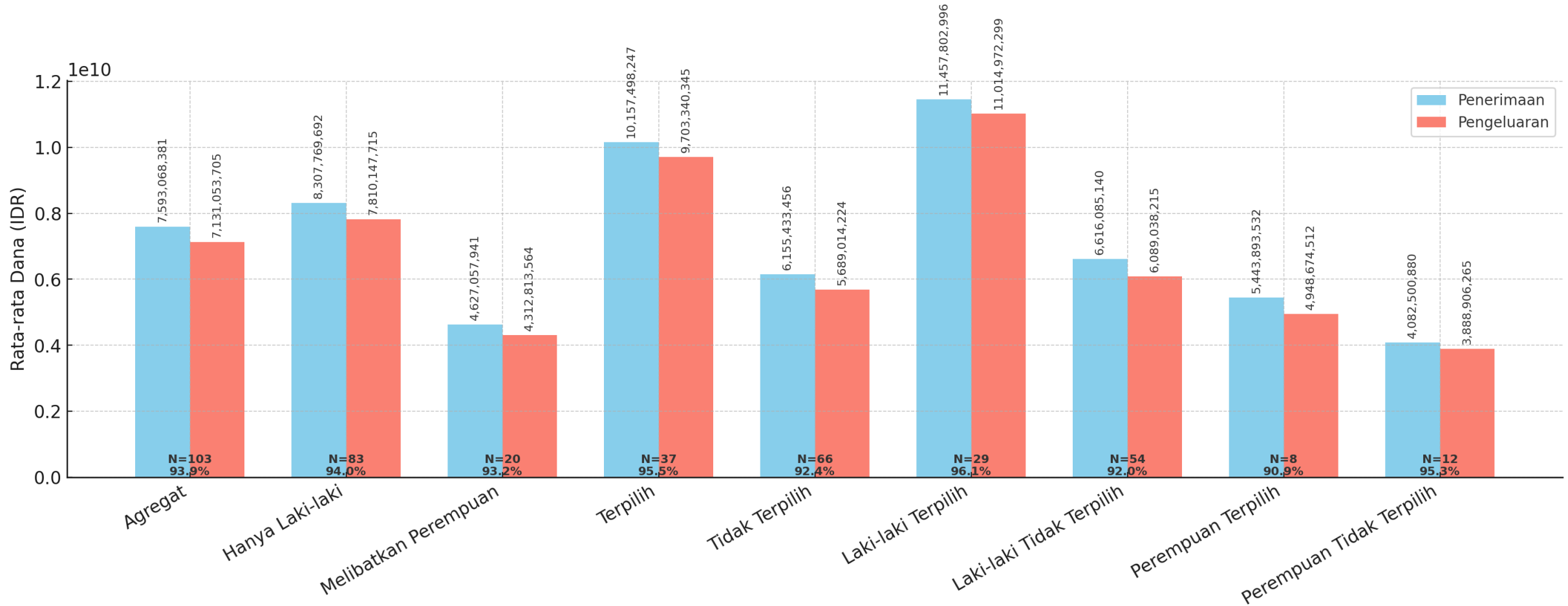
- Pasangan calon hanya laki-laki terpilih mencatatkan penerimaan **110,5%** dan pengeluaran **122,6%** lebih besar dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan terpilih.
- Pasangan calon hanya laki-laki terpilih memiliki tingkat pengeluaran yang lebih besar dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan terpilih, dengan rasio pengeluaran terhadap penerimaan sebesar **96,1%** dibandingkan **90,9%**.
- Mengindikasikan bahwa pasangan calon hanya laki-laki terpilih memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber pendanaan dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan terpilih.
- Ketimpangan akses pendanaan (segregasi gender) lebih besar pada kluster pasangan calon yang terpilih, daripada di seluruh kluster lainnya.

Rerata penerimaan dan pengeluaran pasangan calon gubernur & wakil gubernur tidak terpilih (pemilahan gender)



- Pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih mencatatkan penerimaan **62,1%** dan pengeluaran **56,5%** lebih besar dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan tidak terpilih.
- Pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih memiliki tingkat pengeluaran yang lebih rendah dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan tidak terpilih, dengan rasio pengeluaran terhadap penerimaan sebesar **92%** dibandingkan **95,3%**.
- Mengindikasikan bahwa pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber pendanaan dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan tidak terpilih.

Rerata penerimaan dan pengeluaran pasangan calon gubernur & wakil gubernur (grafik gabungan)



10 pasangan calon gubernur & wakil gubernur dengan penerimaan tertinggi

Penerimaan			
No.	Nama	Provinsi	Penerimaan (IDR)
1.	Pramono Anung Wibowo - H. Rano Karno	Jakarta	84.650.056.739
2.	H. M. Ridwan Kamil - H. Suswono	Jakarta	67.012.104.158
3.	Muhammad Bobby Afif Nasution - Surya	Sumatera Utara	38.399.943.232
4.	Emanuel Melkiades Laka Lena - Johni Asadoma	NTT	34.825.771.332
5.	Ahmad H M. Ali - Abdul Karim Al Jufri	Sulawesi Tengah	28.274.807.000
6.	Rudy Mas'ud - Seno Aji	Kalimantan Timur	25.331.662.649
7.	Simon Petrus Kamlasi - Adrianus Garu	NTT	25.312.280.000
8.	Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala	Sumatera Utara	19.537.082.848
9.	Mawardi Yahya - R.A. Anita Noeringhati	Sumatera Selatan	17.786.744.498
10.	Matius Fakhiri - Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen	Papua	16.368.555.929

10 pasangan calon gubernur & wakil gubernur dengan penerimaan terendah

Penerimaan			
No.	Nama	Provinsi	Penerimaan (IDR)
1.	Sulaiman - Adri Patton	Kalimantan Utara	202.100.008
2.	Dharma Pongrekun - R. Kun Wardana Abyoto	Jakarta	317.922.588
3.	Muhammad Ali Baal Masdar - Arwan M Aras T	Sulawesi Barat	395.584.790
4.	Hj. Raudatul Jannah - Akhmad Rozanie Himawan Nugraha	Kalimantan Selatan	436.607.871
5.	Nikolaus Kondomo - Baidin Kurita	Papua Selatan	490.469.000
6.	Muda Mahendrawan - Jakius Sinyor	Kalimantan Barat	656.629.870
7.	Natalis Tabuni - Titus Natkime	Papua Tengah	658.135.687
8.	H. Husain Alting Sjah - Asrul Rasyid Ichsan	Maluku Utara	790.500.000
9.	Hamzah Isa - Abdurrahman Abubakar Bahmid	Gorontalo	830.950.000
10.	Wempi Wetipo - Agustinus Anggaibak	Papua Tengah	843.450.292

10 pasangan calon gubernur & wakil gubernur dengan pengeluaran tertinggi

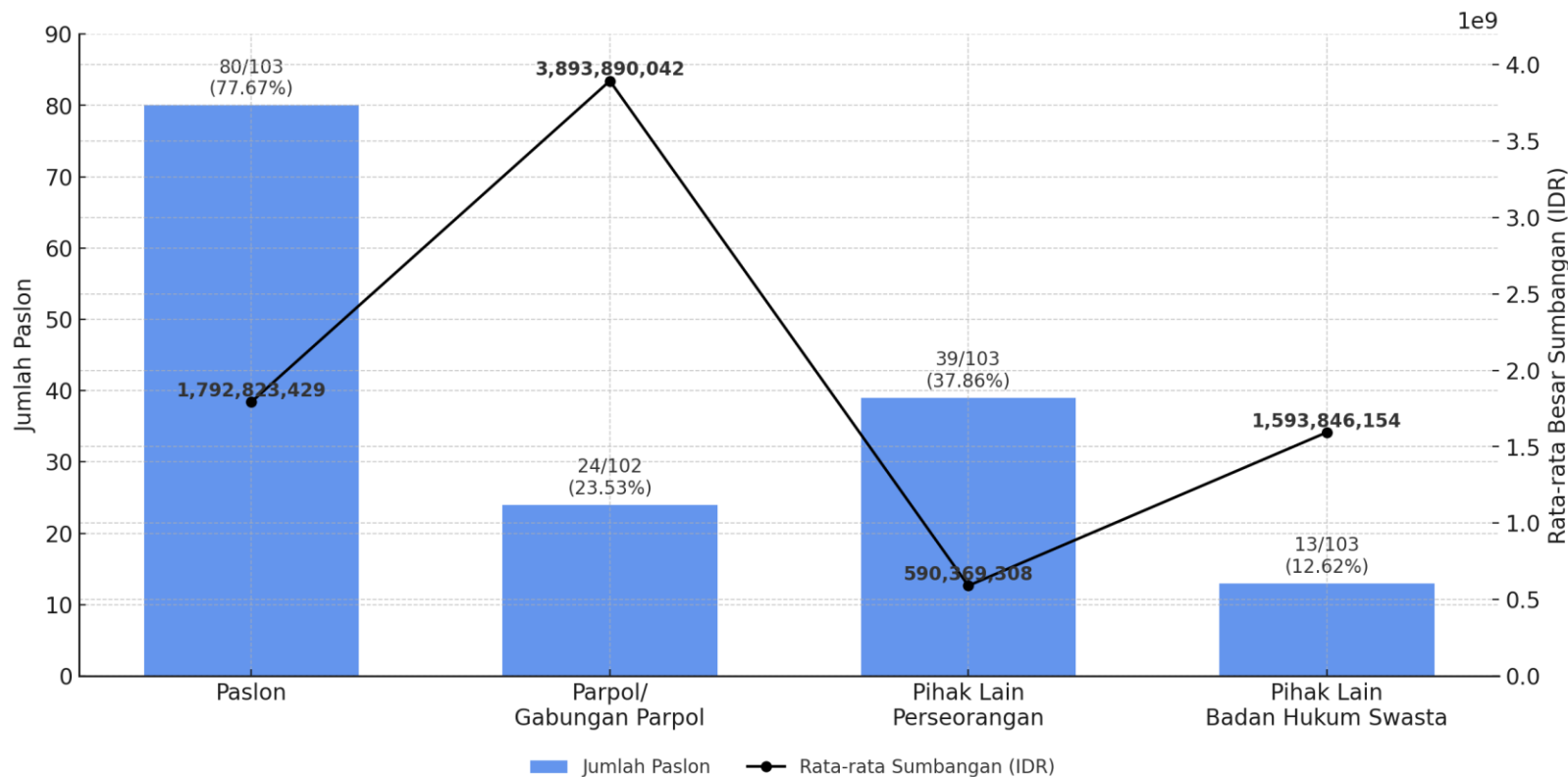
Pengeluaran			
No.	Nama	Provinsi	Pengeluaran (IDR)
1.	Pramono Anung Wibowo - H. Rano Karno	Jakarta	84.600.577.909
2.	H. M. Ridwan Kamil - H. Suswono	Jakarta	66.998.945.832
3.	Muhammad Bobby Afif Nasution - Surya	Sumatera Utara	38.399.853.606
4.	Emanuel Melkiades Laka Lena - Johni Asadoma	NTT	32.910.365.017
5.	Ahmad H M. Ali - Abdul Karim Al Jufri	Sulawesi Tengah	29.454.094.550
6.	Rudy Mas'ud - Seno Aji	Kalimantan Timur	25.331.662.629
7.	Edy Rahmayadi - Hasan Basri Sagala	Sumatera Utara	19.537.022.756
8.	Simon Petrus Kamlasi - Adrianus Garu	NTT	19.010.100.000
9.	Mawardi Yahya - R.A. Anita Noeringhati	Sumatera Selatan	17.786.750.000
10.	Matius Fakhiri - Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen	Papua	15.513.533.117

10 pasangan calon gubernur & wakil gubernur dengan pengeluaran terendah

Pengeluaran			
No.	Nama	Provinsi	Pengeluaran (IDR)
1.	Sulaiman - Adri Patton	Kalimantan Utara	184.170.001
2.	Hidayat Arsani - Hellyana	Kepulauan Bangka Belitung	225.007.502
3.	Bernard Sagrim - Sirajudin Bauw	Papua Barat Daya	247.500.000
4.	Jeffry A. Rahawarin - Abd. Mukti Keliobas	Maluku	308.140.000
5.	Dharma Pongrekun - R. Kun Wardana Abyoto	Jakarta	318.270.373
6.	Muda Mahendrawan - Jakius Sinyor	Kalimantan Barat	371.316.750
7.	Gabriel Asem - Lukman Wugaje	Papua Barat Daya	381.400.000
8.	Muhammad Ali Baal Masdar, - Arwan M Aras T	Sulawesi Barat	388.712.678
9.	Hj. Raudatul Jannah - Akhmad Rozanie Himawan Nugraha	Kalimantan Selatan	431.780.000
10.	Nikolaus Kondomo - Baidin Kurita	Papua Selatan	447.597.000

Sumbangan

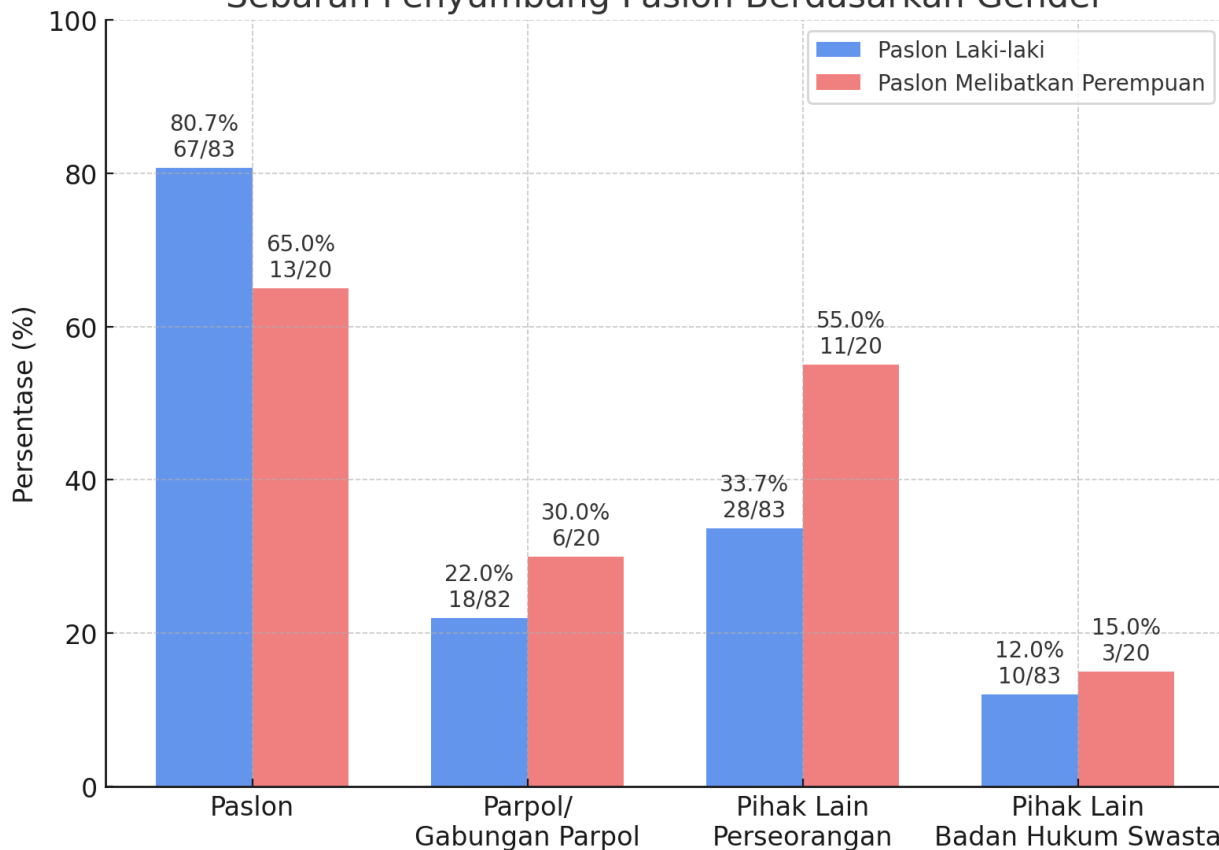
Sebaran penyumbang pasangan calon gubernur & wakil gubernur (agregat)



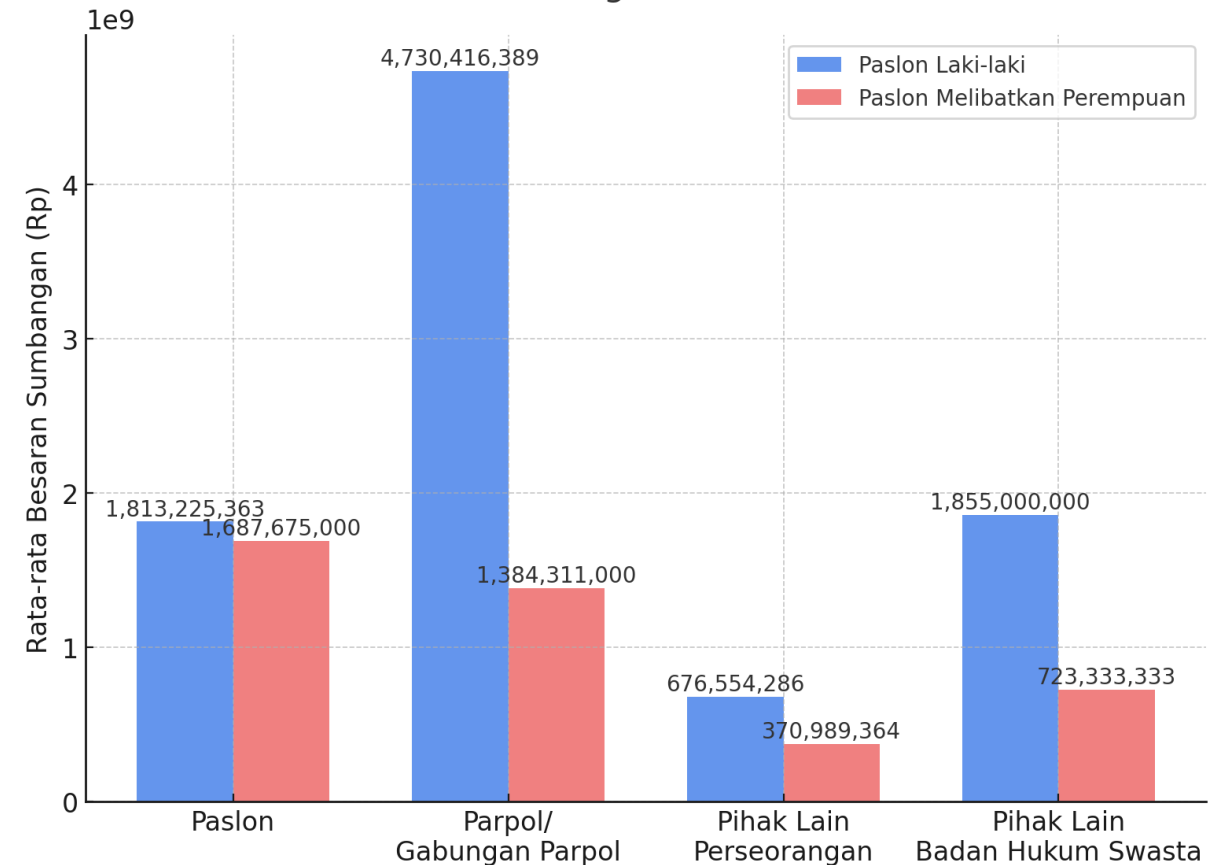
- Mayoritas pasangan calon mencatatkan sumbangan yang berasal dari **dana pribadi**.
- Parpol/gabungan parpol relatif jarang menjadi penyumbang pasangan calon, dibandingkan pasangan calon sendiri dan pihak lain perseorangan. Namun nominal sumbangan dari parpol/gabungan parpol mencatatkan rerata terbesar.
- Sumbangan dari pihak lain perseorangan adalah yang paling umum setelah sumbangan dari pasangan calon sendiri, namun secara nominal mencatatkan rerata terendah.
- Sumbangan dari pihak lain badan hukum swasta adalah yang paling jarang ditemui.

Sebaran penyumbang pasangan calon gubernur & wakil gubernur (pemilahan gender)

Sebaran Penyumbang Paslon Berdasarkan Gender



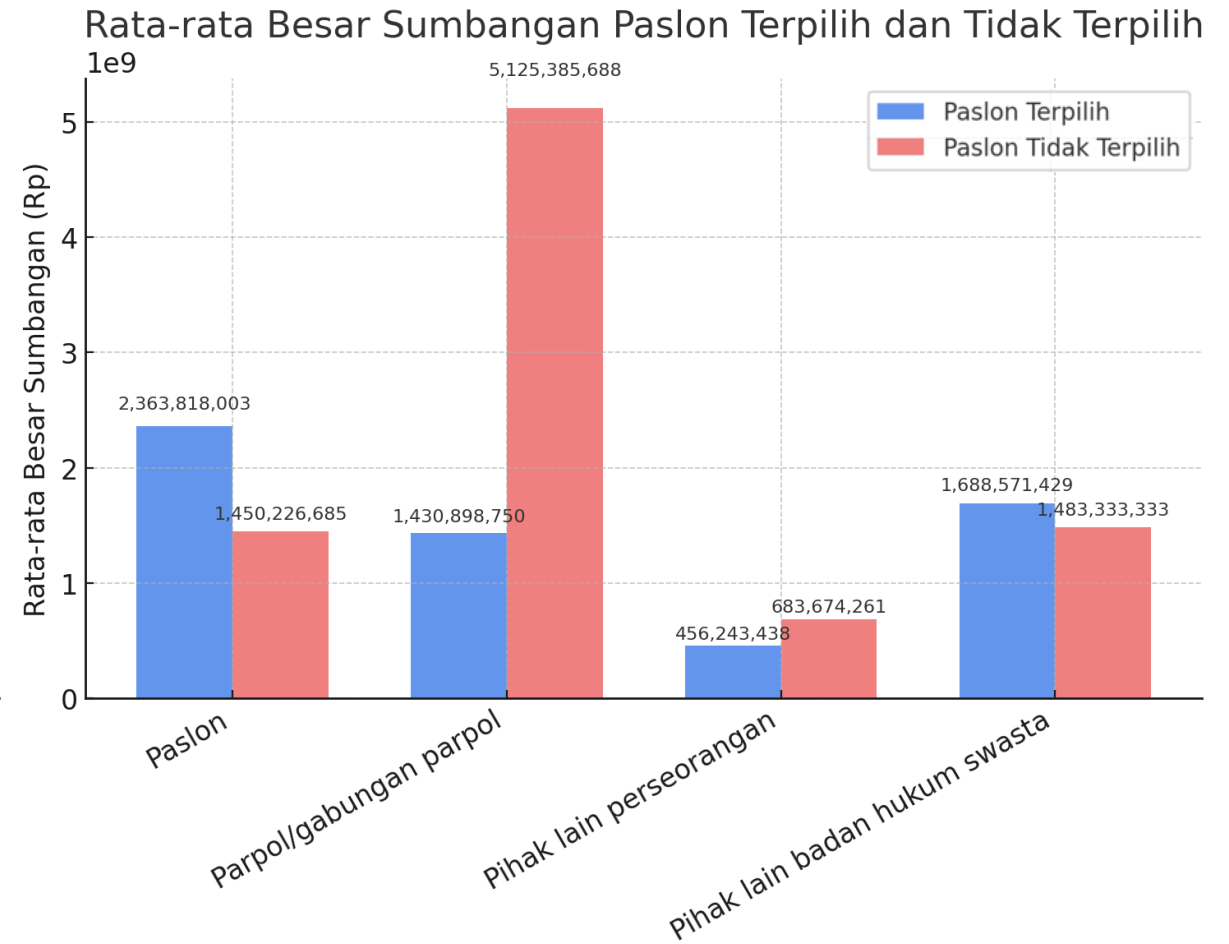
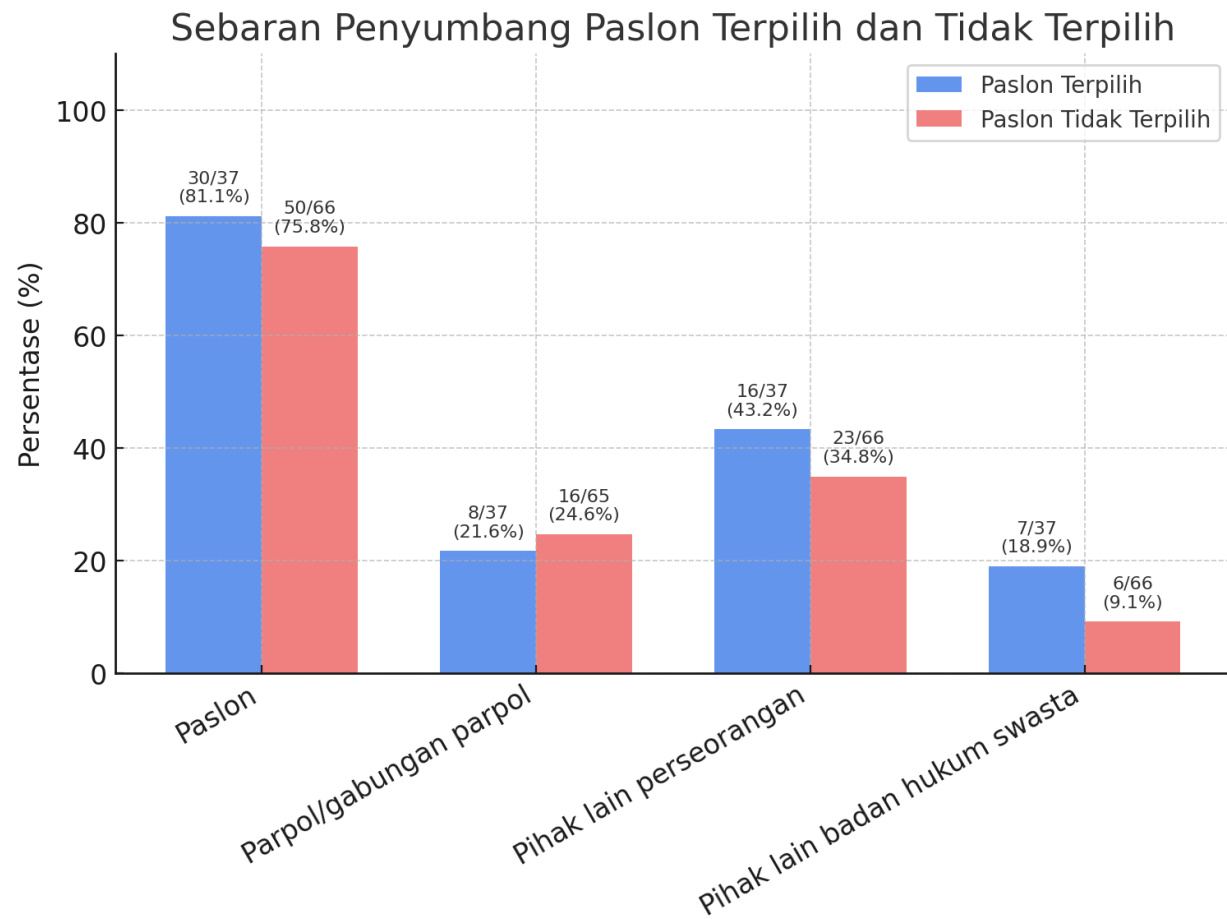
Rata-rata Besaran Sumbangan berdasarkan Gender Paslon



#Highlight: Sebaran penyumbang pasangan calon gubernur & wakil gubernur (pemilahan gender)

- Mayoritas pasangan calon, baik pasangan calon hanya laki-laki maupun pasangan calon melibatkan perempuan, mencatatkan sumbangan yang berasal dari **dana pribadi**.
- Secara proporsi, **pasangan calon melibatkan perempuan** lebih sering mendapatkan sumbangan dari partai politik/gabungan partai politik, pihak lain perseorangan, dan pihak lain badan hukum swasta, namun rerata besarnya lebih rendah daripada yang didapatkan pasangan calon hanya laki-laki.
- Jarak rerata **besaran sumbangan** yang didapatkan pasangan calon hanya laki-laki dan pasangan calon melibatkan perempuan (dari yang terbesar) adalah pada kategori sumbangan yang berasal dari parpol/gabungan parpol, pihak lain badan hukum swasta, pihak lain perseorangan, dan paslon sendiri.
- Mengindikasikan adanya favoritisme elite partai politik dan 'bohir politik' terhadap pasangan calon hanya laki-laki.

Sebaran penyumbang pasangan calon gubernur & wakil gubernur (pemilahan status keterpilihan)

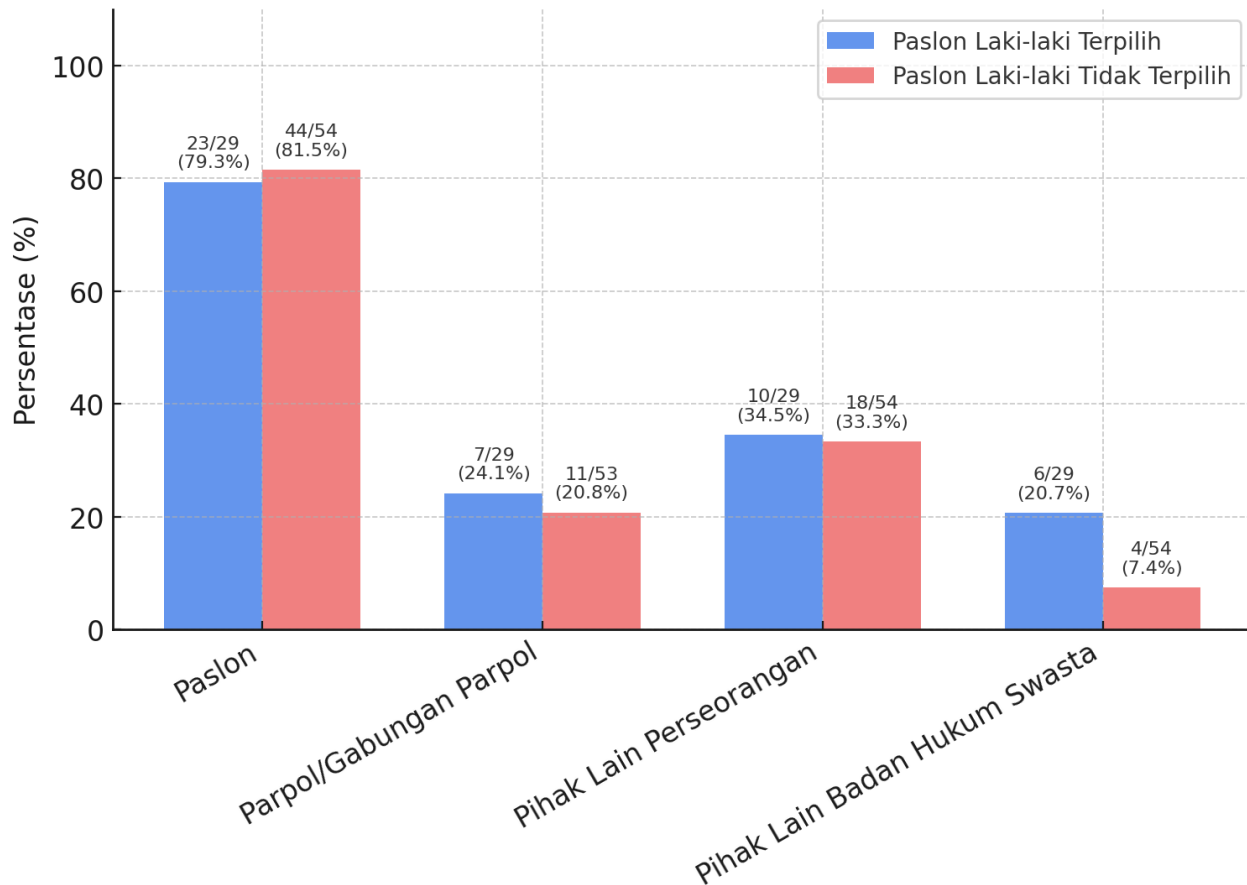


#Highlight: Sebaran penyumbang pasangan calon gubernur & wakil gubernur (pemilahan status keterpilihan)

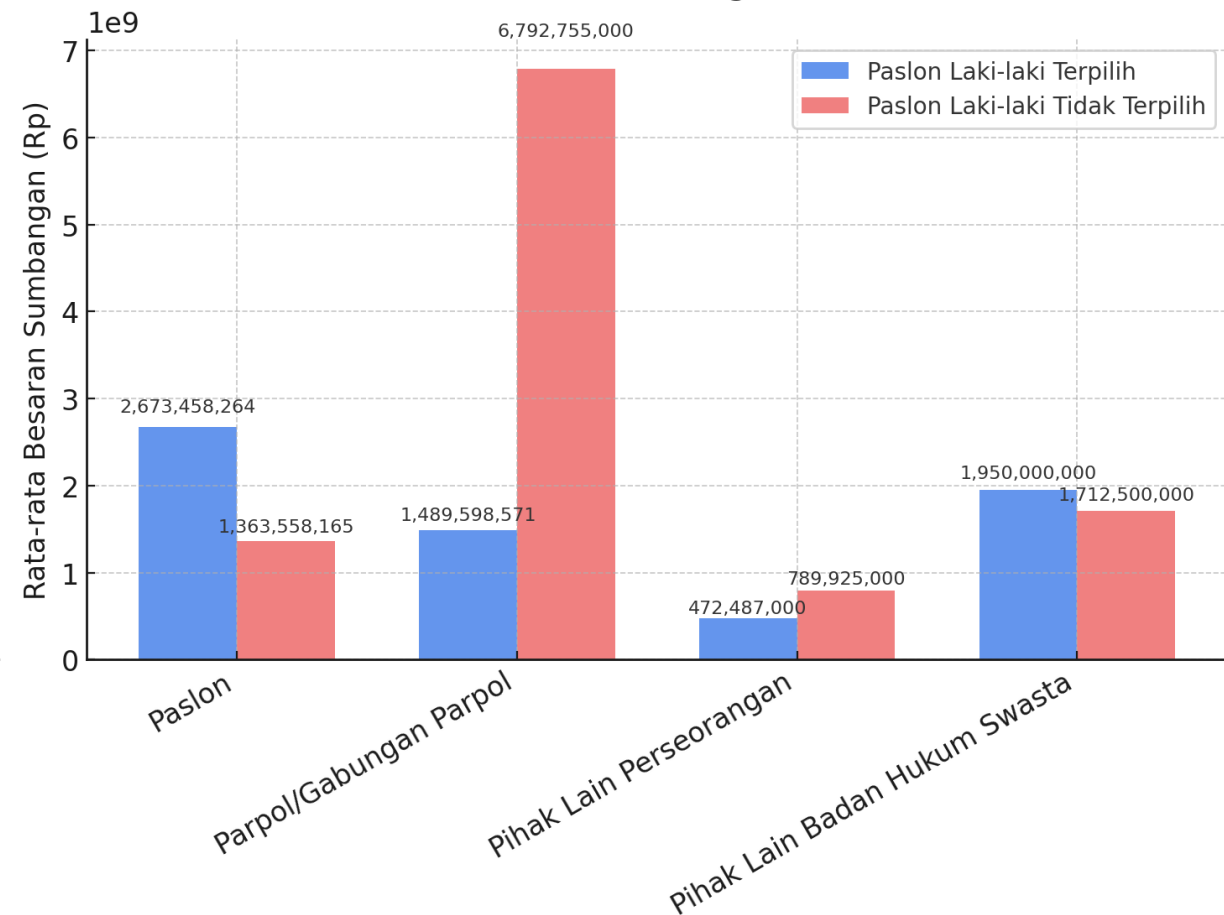
- Mayoritas pasangan calon, baik pasangan calon terpilih maupun pasangan calon tidak terpilih, mencatatkan sumbangan yang berasal dari **dana pribadi**.
- Secara proporsi, lebih banyak pasangan calon tidak terpilih yang mendapatkan sumbangan dari partai politik/gabungan partai politik, dengan rerata besaran yang juga jauh lebih tinggi daripada yang diterima pasangan calon terpilih. Sementara lebih banyak **pasangan calon terpilih** (secara proporsi) mendapatkan sumbangan dari pihak lain **perseorangan dan pihak lain badan hukum swasta**.
- **Rerata besaran sumbangan** yang didapatkan pasangan calon terpilih dari pasangan calon sendiri dan dari pihak lain badan hukum swasta lebih tinggi daripada yang didapatkan pasangan calon tidak terpilih. Selain sumbangan dari partai politik/gabungan partai politik, rerata sumbangan yang lebih besar diberikan kepada pasangan calon tidak terpilih adalah dari pihak lain perseorangan.
- Mengindikasikan kurang efektifnya pengalokasian sumbangan oleh partai politik/gabungan partai politik. Meskipun indikasi ini bisa saja dilatarbelakangi maksud partai politik/gabungan partai politik mengontrol pasangan calon yang sejak awal memang memiliki peluang terpilih lebih kecil.

Sebaran penyumbang pasangan calon gubernur & wakil gubernur yang hanya terdiri dari laki-laki (pemilahan status keterpilihan)

Sebaran Penyumbang Paslon Laki-laki



Rata-rata Besaran Sumbangan Paslon Laki-laki

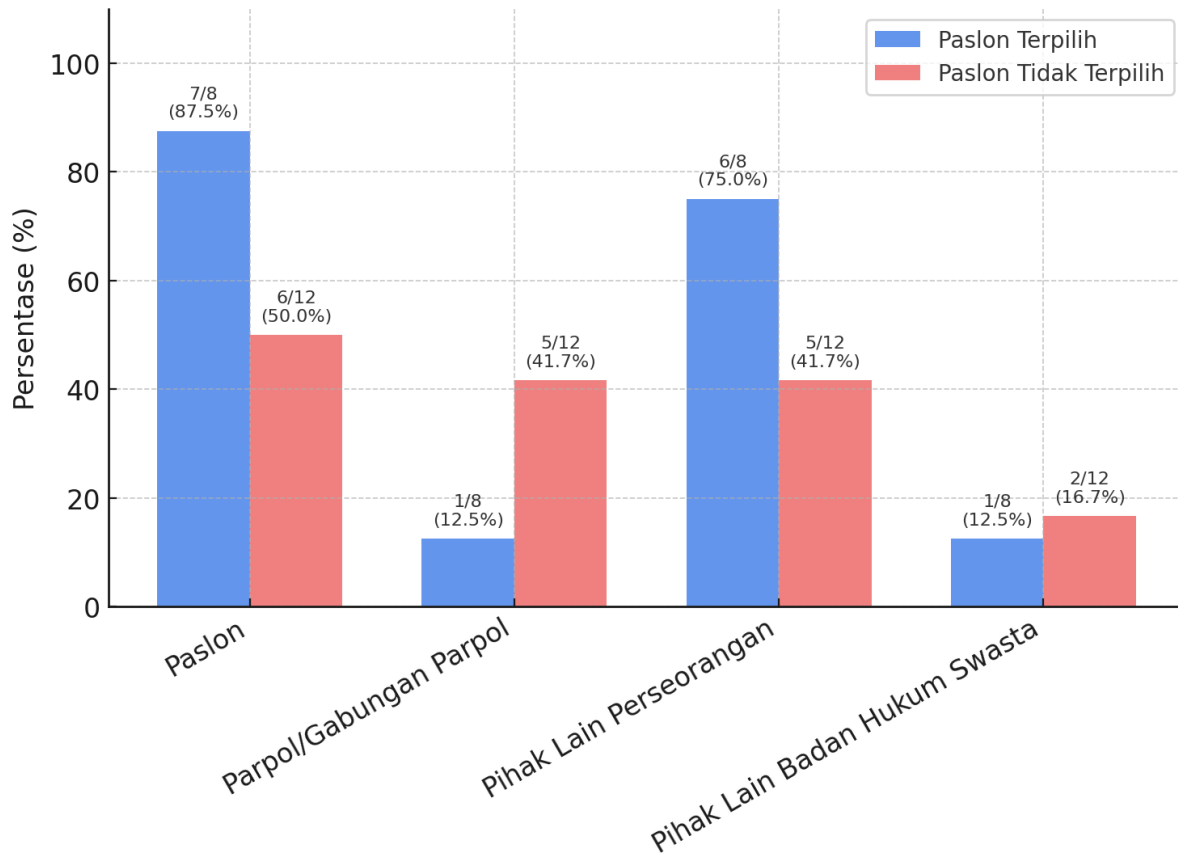


#Highlight: Sebaran penyumbang pasangan calon gubernur & wakil gubernur yang hanya terdiri dari laki-laki (pemilahan status keterpilihan)

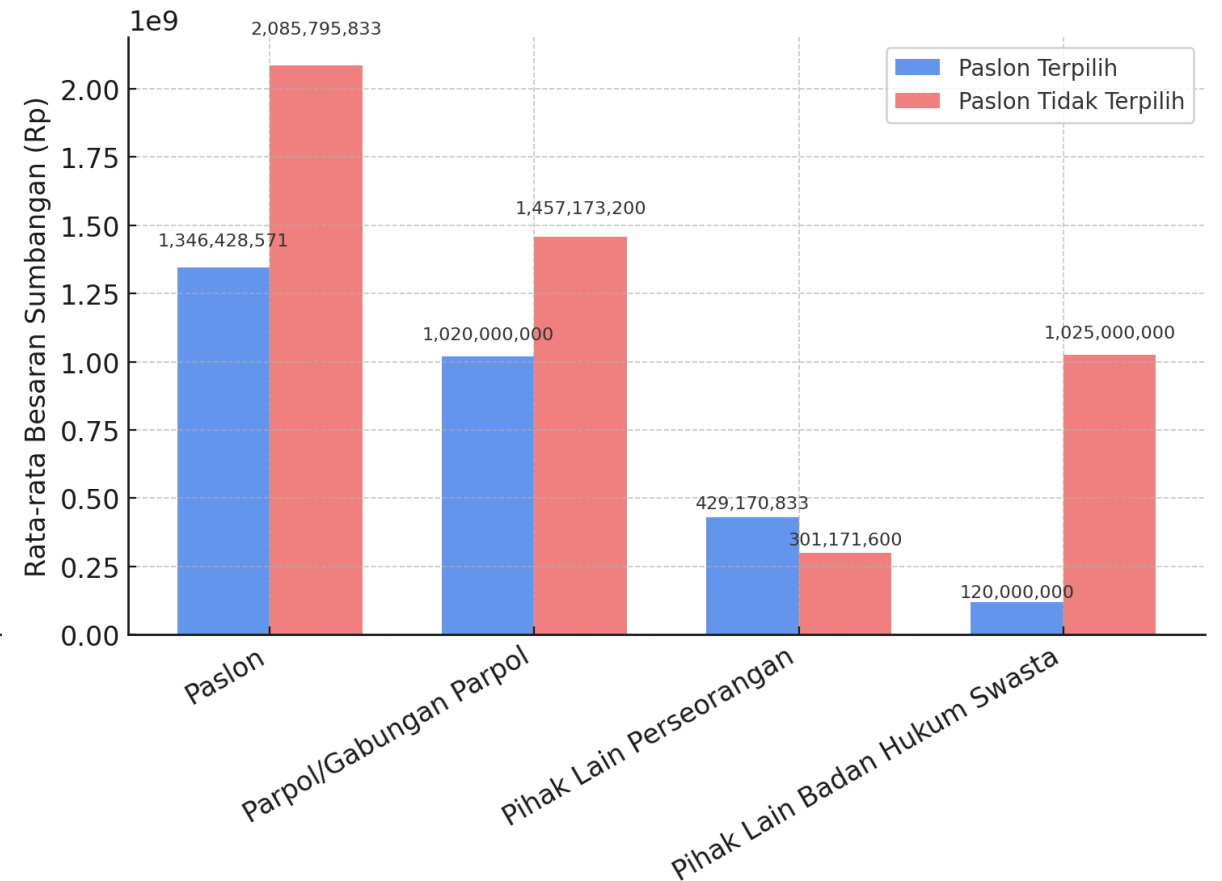
- Mayoritas pasangan calon, baik pasangan calon hanya laki-laki terpilih maupun pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih, mencatatkan sumbangan yang berasal dari **dana pribadi**.
- Dibandingkan pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih, pasangan calon hanya laki-laki terpilih lebih sering mendapatkan sumbangan dari partai politik/gabungan partai politik, pihak lain perseorangan, dan pihak lain badan hukum swasta.
- Dibandingkan pasangan calon hanya laki-laki terpilih, pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih lebih sering mencatatkan sumbangan dari pasangan calon sendiri.
- Pada kategori sumbangan yang berasal dari pasangan calon sendiri dan dari pihak lain badan hukum swasta, pasangan calon hanya laki-laki terpilih mencatatkan nilai sumbangan yang lebih besar dibandingkan pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih.
- Pada kategori sumbangan yang berasal dari partai politik/gabungan partai politik dan dari pihak lain perseorangan, pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih mencatatkan nilai sumbangan yang lebih besar dibandingkan pasangan calon hanya laki-laki terpilih.

Sebaran penyumbang pasangan calon gubernur & wakil gubernur yang melibatkan perempuan (pemilahan status keterpilihan)

Sebaran Penyumbang Paslon yang Melibatkan Perempuan



Rata-rata Besaran Sumbangan Paslon yang Melibatkan Perempuan

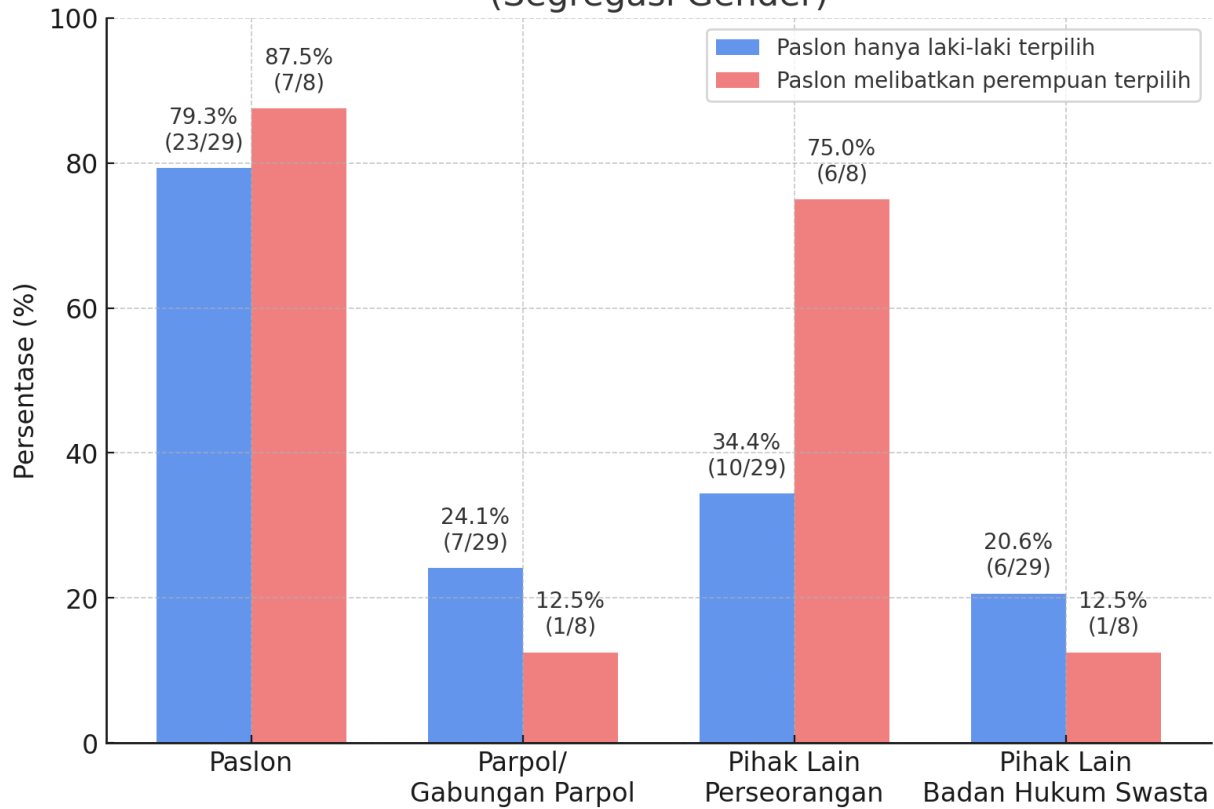


#Highlight: Sebaran penyumbang pasangan calon Gubernur & wakil Gubernur yang melibatkan perempuan (pemilahan status keterpilihan)

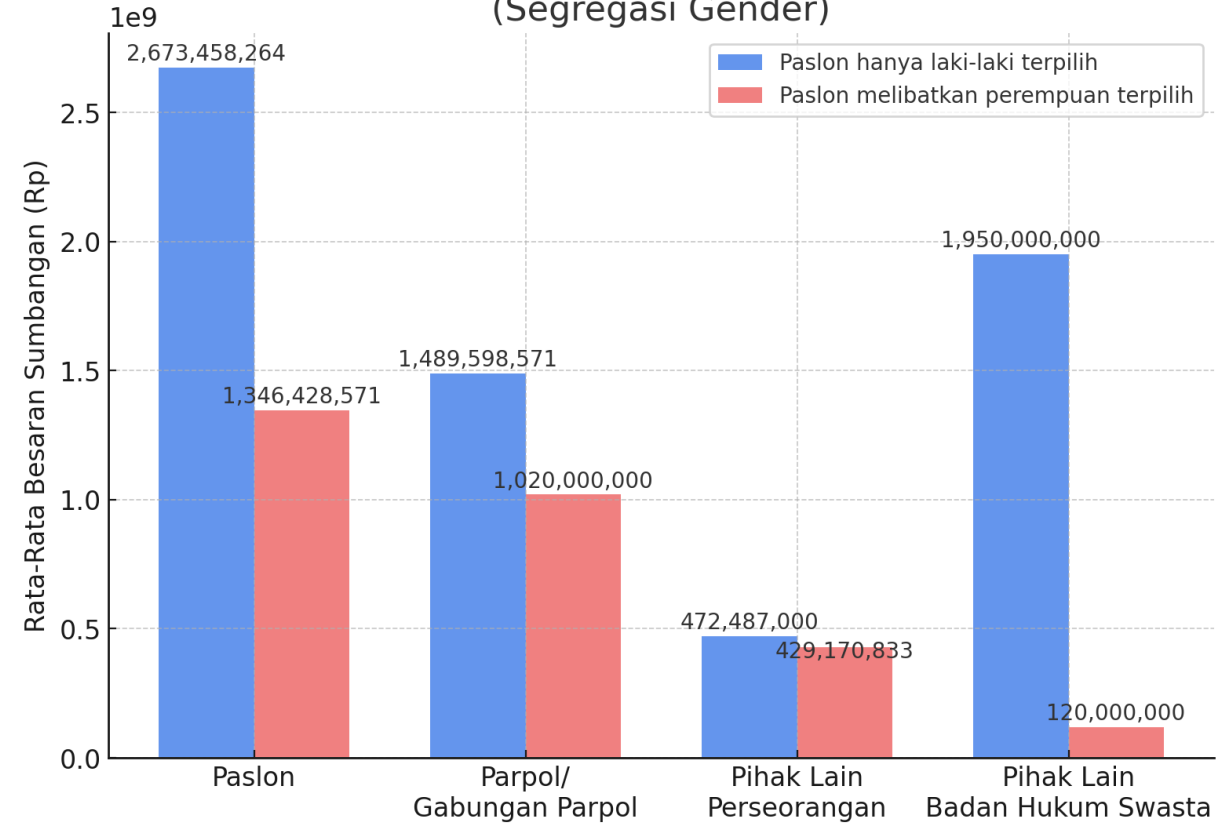
- Mayoritas pasangan calon melibatkan perempuan terpilih mencatatkan sumbangan yang berasal dari dana pribadi dan dari sumbangan pihak lain perseorangan. Dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan tidak terpilih, pasangan calon melibatkan perempuan terpilih juga lebih sering mendapatkan sumbangan dari kelompok ini.
- Dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan terpilih, pasangan calon melibatkan perempuan tidak terpilih lebih sering mendapatkan sumbangan dari partai politik/gabungan partai politik dan dari pihak lain badan hukum swasta.
- Pada kategori sumbangan yang berasal dari pasangan calon sendiri, partai politik/gabungan partai politik, dan pihak lain badan hukum swasta, pasangan calon melibatkan perempuan tidak terpilih mencatatkan nilai sumbangan yang lebih besar dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan terpilih.
- Pada kategori sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan, pasangan calon melibatkan perempuan terpilih mencatatkan nilai sumbangan yang lebih besar dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan tidak terpilih.
- Dalam perbandingan ini, perlu digarisbawahi frekuensi sumbangan yang sangat langka pada kategori penyumbang tertentu (hanya 1 pasangan calon melibatkan perempuan terpilih yang mencatatkan adanya sumbangan dari partai politik/gabungan partai politik dan dari pihak lain badan hukum swasta). Hal ini dapat menyebabkan tidak memadainya penghitungan rerata besaran sumbangan dan menampilkan disparitas yang lebar.

Sebaran penyumbang pasangan calon gubernur & wakil gubernur terpilih (pemilahan gender)

Sebaran Penyumbang Paslon Gubernur & Wagub Terpilih
(Segregasi Gender)



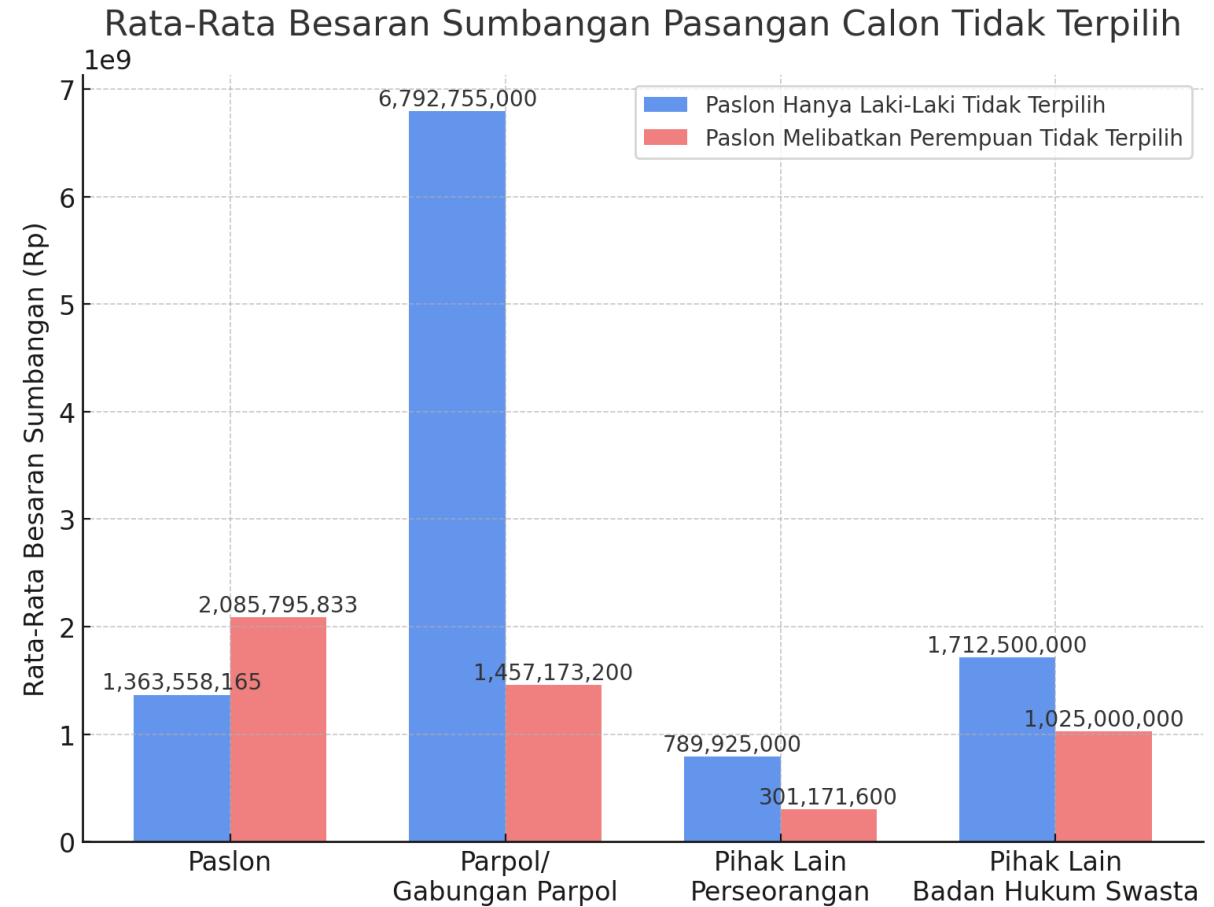
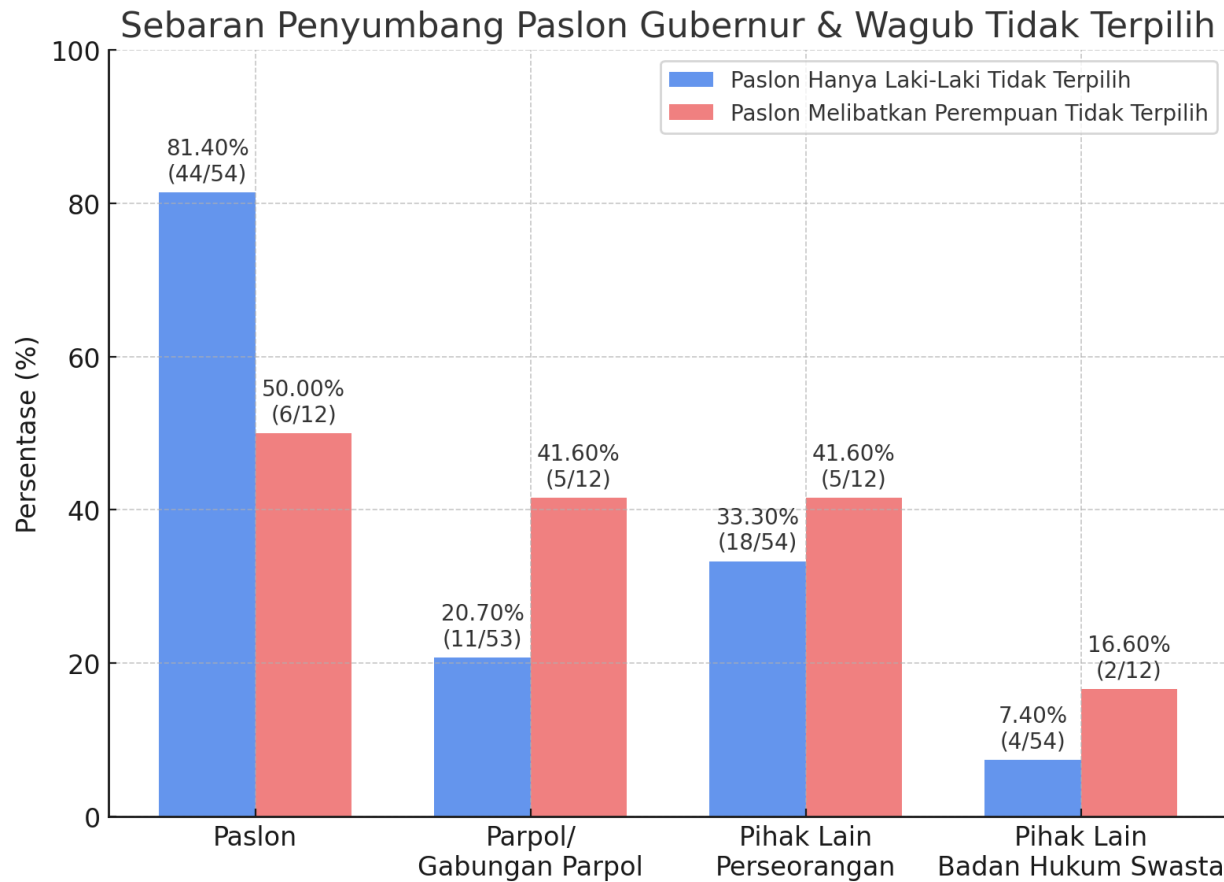
Rata-Rata Besaran Sumbangan Pasangan Calon Terpilih
(Segregasi Gender)



#Highlight: Sebaran penyumbang pasangan calon gubernur & wakil gubernur terpilih (pemilahan gender)

- Mayoritas pasangan calon hanya laki-laki terpilih dan pasangan calon melibatkan perempuan terpilih sama-sama mencatatkan sumbangan yang berasal dari kantong pribadi.
- Mayoritas pasangan calon melibatkan perempuan terpilih juga mencatatkan sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan.
- Dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan terpilih, pada kategori sumbangan partai politik/gabungan partai politik dan pihak lain badan hukum swasta, pasangan calon hanya laki-laki terpilih mencatatkan angka sebaran yang lebih tinggi.
- Dibandingkan pasangan calon hanya laki-laki terpilih, pada kategori sumbangan pasangan calon sendiri dan pihak lain perseorangan, pasangan calon melibatkan perempuan terpilih mencatatkan angka sebaran yang lebih tinggi.
- Pada seluruh kategori sumbangan, rerata nilai sumbangan yang diterima pasangan calon hanya laki-laki terpilih lebih tinggi daripada yang diterima pasangan calon melibatkan perempuan terpilih. Ketimpangan dari yang terbesar adalah pada kategori sumbangan pihak lain badan hukum swasta, sumbangan pasangan calon sendiri, sumbangan partai politik/gabungan partai politik, dan sumbangan pihak lain perseorangan.
- Sejalan dengan pola sumbangan terhadap pasangan calon gubernur & wakil gubernur (data terpilih gender) tanpa dikaitkan dengan status keterpilihan.

Sebaran penyumbang pasangan calon gubernur & wakil gubernur tidak terpilih (pemilahan gender)



#Highlight: Sebaran penyumbang pasangan calon gubernur & wakil gubernur tidak terpilih (pemilahan gender)

- Mayoritas pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih mencatatkan sumbangan yang berasal dari pasangan calon sendiri.
- Dibandingkan pasangan calon melibatkan perempuan tidak terpilih, pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih lebih sering mendapatkan sumbangan dari pasangan calon sendiri.
- Dibandingkan pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih, pasangan calon melibatkan perempuan tidak terpilih lebih sering mendapatkan sumbangan dari partai politik/gabungan partai politik, pihak lain perseorangan, dan pihak lain badan hukum swasta.
- Pada kategori sumbangan yang berasal dari pasangan calon sendiri, pasangan calon melibatkan perempuan tidak terpilih mencatatkan rerata nilai sumbangan yang lebih tinggi daripada pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih.
- Pada kategori sumbangan yang berasal dari partai politik/gabungan partai politik, pihak lain perseorangan, dan pihak lain badan hukum swasta, pasangan calon hanya laki-laki tidak terpilih mencatatkan rerata nilai sumbangan yang lebih tinggi daripada pasangan calon melibatkan perempuan tidak terpilih.

Pasangan calon gubernur & wakil gubernur “tanpa sumbangan”

No.	Nama	Provinsi	Penerimaan	Status Keterpilihan
1.	H. Nadalsyah Koyem - Supian Hadi	Kalimantan Tengah	6.391.500.000	Tidak terpilih
2.	Sherly Tjoanda - Sarbin Sehe	Maluku Utara	4.251.649.066	Terpilih
3.	Hendrik Lewerissa - Abdullah Vanath	Maluku	4.179.644.500	Terpilih
4.	Murad Ismail - Michael Wattimena	Maluku	4.142.713.891	Tidak terpilih
5.	Yohanis Fransiskus Lema - Jane Natalia Suryanto	NTT	3.289.400.000	Tidak terpilih
6.	Yansen TP - Suratno	Kalimantan Utara	2.874.099.404	Tidak terpilih
7.	Zainal A. Paliwang - Ingkong Ala	Kalimantan Utara	2.152.910.000	Terpilih
8.	Muzakir Manaf - Fadhlullah	Aceh	1.457.500.000	Terpilih
9.	Abdul Razak - Sri Suwanto	Kalimantan Tengah	1.379.080.000	Tidak terpilih
10.	Hamzah Isa - Abdurrahman Abubakar Bahmid	Gorontalo	830.950.000	Tidak terpilih

Batas Pengeluaran

10 provinsi dengan batas pengeluaran tertinggi dan terendah

No.	Provinsi	Batas Pengeluaran Tertinggi
1.	Banten	917.811.048.800
2.	Jawa Timur	492.224.640.500
3.	Aceh	394.135.180.000
4.	Sumatera Utara	365.144.800.000
5.	Jakarta	346.799.030.000
6.	Maluku Utara	343.238.820.000
7.	Lampung	342.907.274.000
8.	Kalimantan Timur	279.339.405.000
9.	Sumatera Barat	272.134.690.000
10.	Papua Pegunungan	248.243.378.000

No.	Provinsi	Batas Pengeluaran Terendah
1.	Papua Selatan	23.372.857.000
2.	Kep. Bangka Belitung	25.561.669.600
3.	Bengkulu	29.996.420.000
4.	Gorontalo	30.819.878.200
5.	Riau	34.945.800.000
6.	Bali	42.129.277.400
7.	Sulawesi Barat	56.759.040.000
8.	Papua Tengah	77.420.425.000
9.	Maluku	78.278.775.200
10.	Kalimantan Utara	82.448.060.000

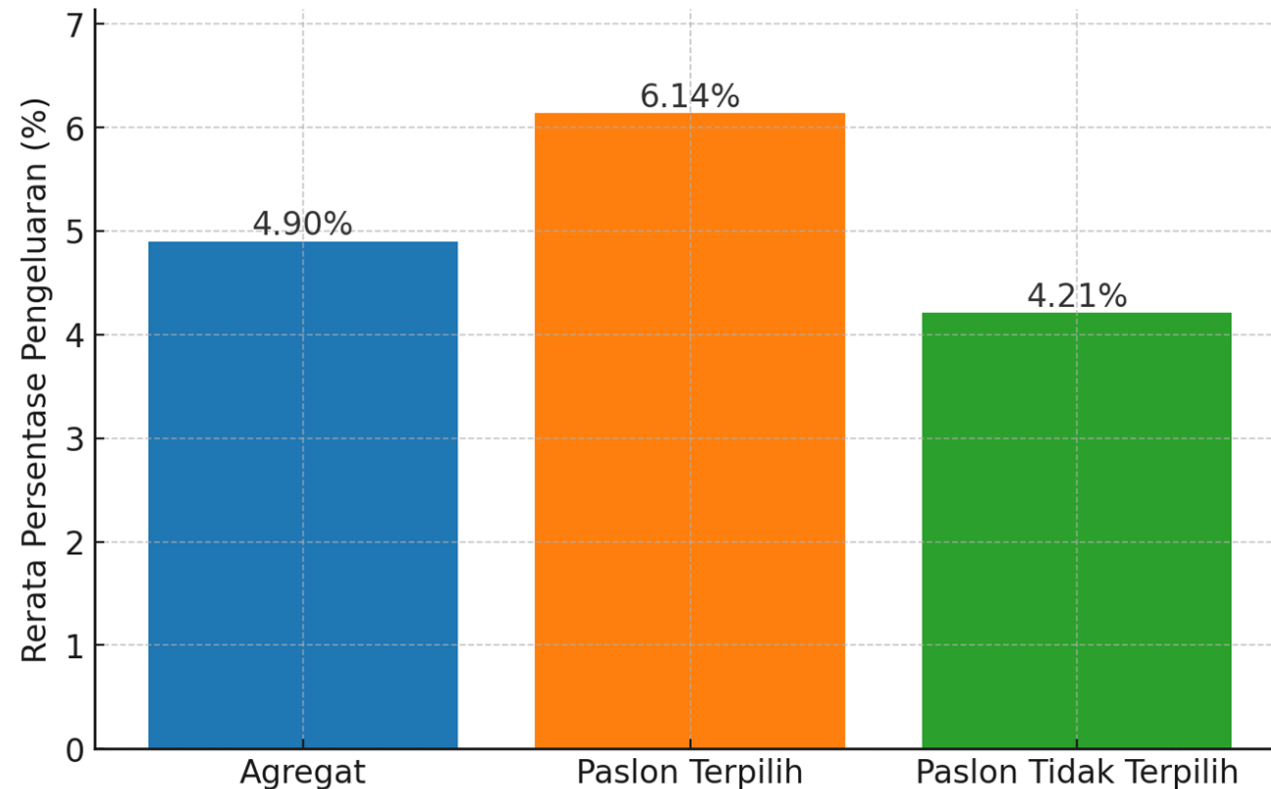
10 pasangan calon gubernur & wakil gubernur dengan pengeluaran tertinggi (berdasar persentase batas pengeluaran)

Pengeluaran				
No.	Nama	Provinsi	Pengeluaran (IDR)	Persentase
1.	Ahmad H M. Ali - Abdul Karim Al Jufri	Sulawesi Tengah	29.454.094.550	27,01%
2.	Romanus Mbaraka - Albertus Muyak	Papua Selatan	6.043.302.032	25,85%
3.	Pramono Anung Wibowo - H. Rano Karno	Jakarta	84.600.577.909,5	24,39%
4.	Syamsuar - Mawardi Muhammad Saleh	Riau	7.294.159.696	20,87%
5.	H. M. Ridwan Kamil - H. Suswono	Jakarta	66.998.945.832	19,31%
6.	Erzaldi Rosman - Yuri Kemal Fadlullah	Kep. Bangka Belitung	4.331.492.746	16,94%
7.	Emanuel Melkiades Laka Lena - Johni Asadoma	NTT	32.910.365.017	15,97%
8.	Made Muliawan Arya - Putu Agus Suradnyana	Bali	6.692.889.000	15,88%
9.	Apolo Safanpo - Paskalis Imadawa	Papua Selatan	3.382.574.367	14,47%
10.	Steven Octavianus Estefanus Kandouw - Alfret Denny Djoike Tuejeh	Sulawesi Utara	13.435.086.780	11,23%

10 pasangan calon gubernur & wakil gubernur dengan pengeluaran terendah (berdasar persentase batas pengeluaran)

Pengeluaran				
No.	Nama	Provinsi	Pengeluaran (IDR)	Persentase
1.	Dharma Pongrekun-R. Kun Wardana Abyoto	Jakarta	318.270.373,54	0,09%
2.	Bernard Sagrim-Sirajudin Bauw	Papua Barat Daya	247.500.000	0,19%
3.	Hj. Raudatul Jannah-Akhmad Rozanie Himawan Nugraha	Kalimantan Selatan	431.780.000	0,2%
4.	Sulaiman-Adri Patton	Kalimantan Utara	184.170.001,24	0,22%
5.	H. Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan	Maluku Utara	797.613.300	0,23%
6.	Gabriel Asem-Lukman Wugaje	Papua Barat Daya	381.400.000	0,30%
7.	H. Muhammad Kasuba-Basri Salama	Maluku Utara	1.190.000.000	0,34%
8.	Muzakir Manaf-Fadhlullah	Aceh	1.457.500.000	0,36%
9.	Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta Gus Hans	Jawa Timur	1.796.165.747	0,36%
10.	Jeffry A. Rahawarin-Abd. Mukti Keliobas	Maluku	308.140.000	0,39%

Rerata persentase pengeluaran pasangan calon gubernur & wakil gubernur dari batas maksimalnya



Komparasi batas pengeluaran kampanye Pilgub dan pengeluaran riil kampanye Pilpres

1.	Banten	917.811.048.800
	Ganjar-Mahfud	664.644.512.267,48
2.	Jawa Timur	492.224.640.500
9.	Sumatera Barat	272.134.690.000
	Prabowo-Gibran	269.008.800.470
10.	Papua Pegunungan	248.243.378.000
31.	Sulawesi Barat	56.759.040.000
	Anies-Muhaimin	49.340.392.060
32.	Bali	42.129.277.400

#Highlight: Batas pengeluaran kampanye dan pengeluaran riil pasangan calon gubernur & wakil gubernur

- Rerata pengeluaran riil yang hanya berkisar **4-6%** dari batas pengeluaran kampanye mengindikasikan **penentuan batas pengeluaran yang tidak efektif** (jauh melampaui pengeluaran realistis) atau pelaporan yang tidak utuh.
- Persilangan data batas pengeluaran kampanye calon gubernur & wakil gubernur dengan data pengeluaran riil kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 juga menunjukkan **anomali**, dimana batas pengeluaran kampanye calon gubernur & wakil gubernur di sejumlah provinsi masih lebih tinggi daripada pengeluaran riil pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkampanye di seluruh wilayah Indonesia (38 Provinsi). Rinciannya adalah sebagai berikut:
 1. Batas pengeluaran 1 provinsi > pengeluaran riil pasangan Ganjar-Mahfud.
 2. Batas pengeluaran 9 provinsi (masing-masing) > pengeluaran riil pasangan Prabowo-Gibran.
 3. Batas pengeluaran 31 provinsi (masing-masing) > pengeluaran riil pasangan Anies-Muhaimin.

Penutup

Kesimpulan

1. Aksesibilitas publik terhadap keterbukaan dana kampanye belum optimal, menyebabkan publik sulit melakukan pengawasan

- Pemantauan yang dilakukan dalam rentang November 2024 hingga Februari 2025 menghasilkan sejumlah catatan terkait dengan aksesibilitas. *Pertama*, terkait dengan Keputusan KPU Provinsi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, keputusan tidak selalu bisa didapatkan melalui kanal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) milik KPU atau KPUD Provinsi. *Kedua*, terkait dengan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), laporan tidak selalu bisa didapatkan melalui kanal infopemilu.kpu.go.id.
- Seluruh kanal yang disebutkan juga kerap menunjukkan masalah responsivitas, mulai dari waktu tunggu yang panjang hingga kegagalan berulang untuk menampilkan halaman yang diminta.
- Upaya untuk mengatasi hambatan dilakukan dengan dua cara: *pertama*, melalui permintaan informasi via surat elektronik kepada 11 KPUD Provinsi untuk Keputusan KPU (12 November 2024). Permintaan ini hanya dipenuhi oleh KPUD Provinsi Sumatera Utara dan tidak memperoleh respons dari 10 KPUD Provinsi lainnya. *Kedua*, melalui permintaan informasi via Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU RI untuk 11 Keputusan KPUD Provinsi dan LPPDK 59 pasangan calon di 19 Provinsi (6 Januari 2025). Permintaan ini dipenuhi secara bertahap pada tanggal 13 Januari 2025 dan 17 Januari 2025.

Kesimpulan

2. Kredibilitas laporan dana kampanye dan penentuan batas pengeluaran kampanye patut dipertanyakan

- Dalam pengertian terbatas, hasil olah data menunjukkan kecenderungan yang rasional, seperti dana kampanye yang lebih besar berkontribusi terhadap keterpilihan, dan pasangan calon terpilih mencatatkan persentase pengeluaran yang lebih mendekati batas pengeluaran dibandingkan yang tidak terpilih. Namun, rerata pengeluaran riil yang hanya berkisar 4-6% dari batas pengeluaran kampanye mengindikasikan penentuan batas pengeluaran yang tidak efektif (jauh melampaui pengeluaran realistis) atau pelaporan yang tidak utuh.
- Kemungkinan pelaporan yang tidak utuh juga lebih menonjol ketika data dalam laporan disandingkan dengan data dari sumber lain. Pada 2020, berdasar data dari Kemendagri, KPK misalnya pernah menyebut bahwa biaya pencalonan bupati dan wali kota berkisar antara Rp 20-30 miliar, sedangkan biaya pencalonan gubernur berkisar Rp 20-100 miliar ([detik.com](https://www.detik.com)). Selain itu, juga muncul pengakuan dari sejumlah pasangan calon mengenai modal yang sesungguhnya dikeluarkan dalam Pilkada 2024, yang berbeda jauh dari jumlah dalam laporan. Syamsuar, Calon Gubernur Provinsi Riau misalnya mengaku menghabiskan modal puluhan miliar, sementara Mohammad Ramdhan Pomanto, Calon Gubernur Sulawesi Selatan mengaku mengeluarkan sekitar Rp 50 miliar ([TEMPO](https://www.tempo.co.id)). Dalam laporan, pengeluaran yang dicatatkan keduanya masing-masing sebesar Rp 7 miliar dan Rp 3 miliar. Keduanya juga gagal terpilih sebagai Gubernur Riau dan Gubernur Sulawesi Selatan.

Kesimpulan

3. Laporan dana kampanye merepresentasikan ketimpangan signifikan akses pendanaan kandidat laki-laki dan kandidat perempuan dalam Pemilihan Gubernur 2024

- Meski tidak ada satupun pasangan calon yang terdiri dari calon gubernur dan calon wakil gubernur perempuan, namun kehadiran perempuan sebagai salah satunya terindikasi berimplikasi terhadap dana kampanye yang lebih rendah. Dari data sumbangan, terlihat bahwa pasangan calon melibatkan perempuan memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap pendanaan eksternal (sumbangan dari partai politik/gabungan partai politik, pihak lain perseorangan, dan pihak lain badan hukum swasta), namun nominal yang bisa diperoleh secara signifikan jauh lebih kecil daripada yang diperoleh pasangan calon laki-laki.
- Temuan ini sekaligus mendukung asumsi bahwa perempuan menanggung beban berlapis dalam kontestasi elektoral di Indonesia. Pada Pemilihan Gubernur 2024, perempuan bukan hanya sulit memperoleh kandidasi dan menghadapi stigmatisasi, melainkan juga sulit berkontestasi lantaran akses pendanaan yang jauh tertinggal.

Rekomendasi

1. Transparansi pendanaan kampanye sebagai kesungguhan, bukan sekadar formalitas

KPU dan Bawaslu harus dapat memastikan transparansi pendanaan kampanye menggambarkan pendanaan yang seutuhnya, bukan sekadar formalitas. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur tentang pemilu dan pilkada dan peraturan KPU yang mengatur tentang dana kampanye pemilu dan pilkada harus memungkinkan dilakukannya upaya kontrol selain audit kepatuhan laporan dana kampanye, seperti pengawasan melekat terhadap aktivitas kampanye, pengawasan transaksi keuangan (bekerja sama dengan PPATK), audit investigatif, hingga langkah penegakan hukum yang efektif dalam hal ditemukan kecurangan dalam laporan dana kampanye.

2. Transparansi pendanaan kampanye untuk partisipasi publik bermakna

KPU harus mengevaluasi pemanfaatan SIKADEKA dalam pemenuhan hak publik atas transparansi pendanaan kampanye. KPU juga harus memastikan bahwa pada pemilu dan pilkada yang akan datang, publik memiliki akses yang maksimal terhadap informasi pendanaan kampanye, berupa informasi penerimaan dan pengeluaran yang terperinci, bukan sekadar ringkasan, sesuai yang dimungkinkan menurut UU Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, kanal transparansi pendanaan kampanye yang disediakan KPU harus memenuhi standar keandalan (mudah dan cepat untuk diakses, serta menyajikan informasi mutakhir).

Rekomendasi

3. Melebarkan jalan kepemimpinan politik perempuan

Partai politik harus mengagendakan pengarusutamaan gender dalam setiap fungsinya. Kepemimpinan politik perempuan harus menjadi salah satu ukuran keberhasilan fungsi pendidikan, rekrutmen, dan kaderisasi partai politik. Kebijakan afirmatif, seperti alokasi khusus anggaran partai untuk pemberdayaan perempuan juga menjadi langkah yang penting dilakukan. Mandat ini dapat dituangkan dalam undang-undang yang mengatur tentang partai politik, dan disertai mekanisme monitoring yang memadai dari kementerian/lembaga pemerintahan yang relevan.

Dalam konteks kebijakan publik, partai politik juga harus memotori kebijakan yang pro terhadap kesetaraan gender, termasuk mereformasi tata kelola pendanaan politik yang menjadi sebab mahal biaya politik dan menghambat partisipasi perempuan.

4. Mengurai “benang kusut” mahal biaya politik

Biaya politik yang mahal merupakan hulu permasalahan korupsi dan secara khusus juga menjadi hambatan partisipasi politik perempuan. Permasalahan ini harus diatasi Pemerintah dan DPR dalam kerangka politik hukum dan kebijakan yang memadai dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi. “Solusi instan” seperti perubahan dari pilkada langsung ke pemilihan lewat DPRD patut diwaspadai hanya akan menggeser transaksi penyebab mahal biaya politik tanpa benar-benar menghilangkannya.

Terima **Kasih**

